



Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan
Universitas Garut
ISSN: 1907-932X

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru Di Kabupaten Kulon Progo

Inaya Ainun Nafisa, Amilia Rizaki, Arlinda Febriyanti, Erika Findi
Anggraeni, Amelya Kurniadevi, Ebni Sholikhah
Universitas Negeri Yogyakarta

inayaainun.2021@student.uny.ac.id, amiliarizki.2021@student.uny.ac.id,
arlindafebriyanti.2021@student.uny.ac.id, erikafindi.2021@student.uny.ac.id,
amelyakurniadevi.2021@student.uny.ac.id, ebnisholikhah@uny.ac.id

Abstrak

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Namun, masih ditemukan rendahnya kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo, khususnya pada jenjang SMP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru melalui program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil UKG SMP di kabupaten Kulonprogo masih dibawah rata-rata nilai UKG DIY, yaitu 68,03. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sudah mengimplementasikan beberapa program peningkatan kompetensi guru SMP seperti Bimtek MGMP, Diklat Pendidikan Inklusi, dan Bimtek Karya tulis. Faktor pendukung program tersebut adalah dukungan dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan kuota peserta, kurangnya motivasi guru, dan minimnya pendampingan serta tindak lanjut pasca dilaksanakannya program.

Kata kunci: Implementasi, Peningkatan Kompetensi Guru, SMP

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bentuk investasi manusia untuk modal di masa depan baik untuk dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lainnya, hal ini disebabkan oleh kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah (Fitri, 2021). Upaya pemerintah sebagai bentuk meningkatkan kualitas manusia dilakukan dengan menciptakan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu dimaknai dengan instansi pendidikan memenuhi kebutuhan orang tua, siswa, dan masyarakat secara maksimal bahkan melebihi yang dibutuhkan, menumbuhkan dan mengembangkan sikap taat, tunduk kepada Sang Pencipta, dan tidak tinggi hati atas ilmu dan gelar yang didapat, serta memperbaiki sikap dan pola pikir untuk menjadi manusia dan warga yang baik (Kodrat, 2019).

Dalam mewujudkan pendidikan bermutu, guru sebagai harapan dalam pelayanan pendidikan secara langsung ke peserta didik memerlukan kompetensi yang mendorong terwujudnya harapan. Peningkatan kompetensi guru dapat menghasilkan mutu pembelajaran yang baik dan lulusan yang berkualitas. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 menjelaskan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 menjelaskan peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya pembinaan guru oleh pemerintah.

Dalam prakteknya, permasalahan guru yang ada di Indonesia sangat kompleks. Banyak guru yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga guru tidak optimal dalam pembelajaran dan banyak guru yang menjalankan tugasnya sebagai pekerjaan bukan panggilan sehingga mempengaruhi kualitas guru (Nur & Kurniawati, 2022). Hasil UKG (uji kompetensi guru) menunjukkan kompetensi guru rendah, rata-rata nasional hasil UKG di bidang profesional dan pedagogik 53,02, untuk kompetensi dibawah standar kompetensi minimal 55 yaitu sebesar 48,94 pada tahun 2015 (Maulipikasi, 2016). Banyak guru yang belum bisa menggunakan komputer serta metode belajar yang masih tradisional sehingga berdampak pada keaktifan peserta didik.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang unggul dalam bidang pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Dalam praktek pendidikan, keempat kabupaten dan 1 kota tersebut tentunya memiliki tantangan yang berbeda sehingga hasilnya juga berbeda. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang melaksanakan uji kompetensi guru.

Gambar 1. Jumlah Guru Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022/2023



Sumber: Data pokok pendidikan (Kemendikbudristek)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah guru paling sedikit. Selain itu nilai rata-rata uji kompetensi guru juga paling rendah yaitu sebesar 65,91 dibawah rata-rata yaitu 67,02 (Rostaviana, 2018). Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil lulusan di Kabupaten Kulon Progo. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo masih berjuang untuk meningkatkan kompetensi guru mengingat kualitas guru sangat berdampak pada proses pembelajaran dan hasil lulusan.

Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tiap tahunnya memiliki variasi antar kabupatennya. Berdasar hasil statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, APS usia 13-15 tahun di wilayah Kulon Progo pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan 0,27%, yaitu dari 99.06% ke 98.79%. Kabupaten lain yang mengalami penurunan APS di DIY seperti Bantul sebanyak 0,38%, Gunung Kidul 0,2% sedangkan untuk kabupaten Sleman dan Kota memperoleh peningkatan APS (BPS DIY, 2020). Dari masalah tersebut peneliti melakukan penelitian tentang kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan “Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di Kabupaten Kulon Progo”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memperoleh, menghimpun, mengolah, menganalisis, serta mendefinisikan data secara

kualitatif (Bachtiar, 1997). Subjek yang diteliti dalam penelitian ini Kepala Seksi PTK SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Wates, Guru BK SMP N 1 Sentolo, Kepala Sekolah SMP N 2 Pengasih, dan operator PTK SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, SMP N 1 Wates, SMP N 1 Sentolo, dan SMP N 2 Pengasih. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Kulon Progo

Peningkatan kompetensi guru terus diupayakan pemerintah karena kompetensi guru berpengaruh dengan bagaimana guru tersebut menjalankan dan bertanggung jawab atas profesinya. Menjadi seorang guru bukan tugas yang mudah. Guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap peserta didik, oleh karena itu guru harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dua diantara kompetensi tersebut ikut diujikan dalam UKG yaitu kompetensi pedagogik dan profesional.

Uji kompetensi guru merupakan bentuk penilaian secara nasional mengenai kompetensi guru. Uji kompetensi guru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2012, syarat untuk mengikuti UKG tersebut adalah guru yang sudah memiliki sertifikasi guru. Pada pelaksanaan berikutnya yaitu tahun 2015 dan 2019 UKG dilaksanakan untuk seluruh guru di Indonesia dan wajib diikuti karena program dari pemerintah pusat. Dari tahun terakhir dilaksanakannya UKG, berdasarkan data dari Dapodik Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai pada jenjang sekolah menengah pertama, yaitu sebesar 68,03. Pada dapodik nilai tersebut sama hingga tahun 2021. Kesamaan nilai tersebut terjadi karena UKG tidak dilaksanakan setiap tahun sehingga data pada Dapodik sama seperti tahun sebelumnya. Dari data dapodik pada tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan hasil yang sama atau flat itu dikarenakan setelah tahun 2019 belum terlaksana lagi uji kompetensi guru. Pada tahun berikutnya, data UKG tercatat sama.

Gambar 2. Hasil UKG Tahun 2019-2021



Sumber: Data FOKOR Pendidikan Kemendikbudristek

Perolehan hasil UKG tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo mendapat nilai terendah pada jenjang sekolah menengah pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Gambar 3. Hasil UKG Provinsi DIY Tahun 2019



Sumber: Data FOKOR Pendidikan Kemendikbud

Dari hasil tersebut, peneliti tidak dapat membuat trend berdasarkan hasil UKG karena UKG tidak terlaksana setiap tahun dan jangka waktu pelaksanaannya tidak tetap. Untuk hasil UKG juga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tidak mengetahui langsung hasilnya karena yang mengelola nilai langsung dari pemerintah pusat. Walaupun dalam pengelolaan nilai langsung dari pusat, jika disesuaikan dengan misi nomor 1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang berbunyi “Mewujudkan SDM

yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya” yang salah satu programnya adalah pembinaan ketenagaan yang meliputi tenaga pendidik seharusnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tetap mempunyai data sebagai bahan evaluasi terlebih lagi dari hasil UKG Kabupaten Kulon Progo mendapat nilai paling rendah dibanding kabupaten/kota lain di DIY. Hal ini terjadi karena Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menganggap bahwa UKG merupakan tanggung jawab pusat dan kurang memperdulikan terkait UKG padahal dari hasil tersebut memperlihatkan terdapat masalah pada guru yang harus segera di evaluasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Kurangnya kepekaan dan perhatian dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo pada permasalahan yang terjadi secara tidak langsung berpengaruh pada rendahnya peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo. Tanpa disadari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo kurang menjalankan dengan baik misinya terkait SDM karena guru merupakan unsur terpenting dalam pendidikan yang kurang diperhatikan dalam data administrasinya yang dibuktikan dengan kurang perhatiannya dalam hasil UKG. Walaupun hanya kompetensi pedagogik dan professional yang diujikan di UKG tetapi 2 kompetensi lainnya tidak kalah penting dan keempatnya harus dimiliki oleh guru, setiap kompetensi memiliki aspek dan cara penilaian masing-masing, yaitu sebagai berikut:

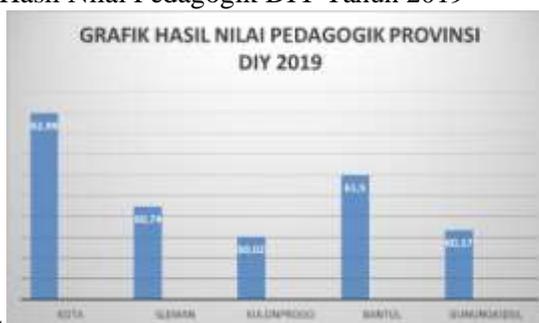
a) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam memahami peserta didik dan merancang pembelajaran hingga evaluasi hasil belajar. Kompetensi guru dalam penyusunan rencana pembelajaran meliputi: 1) mampu mendeskripsikan tujuan; 2) mampu memilih materi 3) mampu mengorganisir materi; 4) mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran; 5) mampu menentukan sumber belajar atau alat peraga pembelajaran; 6) mampu menyusun perangkat penilaian; 7) mampu menentukan teknik penilaian; dan 8) mampu mengalokasikan waktu. Dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan program yang bernama bimtek MGMP khusus guru mata pelajaran, program tersebut untuk peningkatan kualitas guru dalam pembelajarannya.

Dalam uji kompetensi guru di kabupaten Kulon Progo juga terdapat uji pedagogik dan pada data terakhir tahun 2019 hasil UKG pedagogik sebesar 60,02 untuk rata-rata dari semua jenjang pendidikan. Untuk Provinsi DIY sendiri memiliki nilai rata-rata sebesar 60,94 sehingga hasil UKG pedagogik Kabupaten Kulon

Progo di bawah rata-rata daerah (NPD, 2019). Selain itu berdasarkan Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten yang memiliki nilai rata-rata yang paling rendah di provinsi DIY.

Gambar 4. Hasil Nilai Pedagogik DIY Tahun 2019



Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbudistek

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui kabupaten kulonprogo menjadi kabupaten yang memiliki hasil rata-rata nilai UKG terendah di provinsi DIY. Tentu saja hal ini dapat berpengaruh pada peningkatan mutu hasil pendidikan. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pengimplementasian teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang dimana guru masih menjadi pusat pembelajaran.

b) Kompetensi Profesional

Dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Guru profesional dapat dilihat dari bagaimana beliau menunjukkan ciri khasnya dalam menjalani profesinya. Kompetensi profesional guru dapat dapat ditunjukkan dengan tingkat penguasaan materi, struktur dan konsep, pola pikir keilmuan, standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu oleh guru, penguasaan dan pengembangan materi, keprofesionalan yang berkelanjutan, serta keahlian teknologi (Dudung, 2018). Kompetensi profesional juga diikutkan dalam uji kompetensi guru dan pada tahun 2019 hasil UKG kompetensi profesional di Kabupaten Kulon Progo sebesar 68,44, sedangkan rata-rata untuk Provinsi DIY sebesar 69,63 (NPD, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai UKG kompetensi profesional di Kabupaten Kulon Progo di bawah rata-rata daerah. Selain itu, sesuai dengan standar

kompetensi minimal (SKM) yang telah ditetapkan Kemendikbud hasil nilai uji kompetensi profesional masih rendah dibandingkan wilayah wilayah lain di provinsi DIY.

Gambar 5. Hasil Nilai Profesional DIY Tahun 2019



Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten yang memiliki nilai kompetensi profesional paling rendah dibanding dengan wilayah wilayah lain di provinsi DIY. Tentu saja hal ini berdampak pada bagaimana seorang guru memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran.

c) **Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial**

Kompetensi kepribadian dan sosial keduanya sama-sama bisa dinilai dengan pihak-pihak yang berinteraksi dengan guru sehingga tidak ada penilaian yang dilakukan pemerintah. Kedua kompetensi ini bisa dinilai oleh kepala sekolah, rekan sesama guru, warga sekitar sekolah, peserta didik, dan orang tua. Kompetensi kepribadian seorang guru harus mencakup beberapa pengembangan kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadiannya yang dewasa, sikap pribadi yang arif, kepribadian yang wibawa, kepribadian yang dapat dijadikan panutan untuk siswanya, serta menjadi pribadi yang berakhlak mulia (Rohman, 2020). Kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru dapat dicerminkan melalui beberapa indikator, yaitu dengan melalui interaksi guru dengan siswa, interaksi guru dengan kepala sekolah, interaksi antar sesama guru atau rekan kerja, interaksi guru dengan orang tua/wali siswa, serta melalui interaksi antara guru dengan masyarakat (Rohman, 2020). Pada 3 sekolah yang diteliti yaitu SMP N 1 Wates, SMP N 1 Sentolo, dan SMP N 2 Pengasih melihat kedua kompetensi tersebut menggunakan komunikasi sehingga tidak berbentuk kuesioner ataupun paper. Tetapi, pada SMP N 2 Pengasih

penilaian dilakukan dari kepala sekolah kepada guru dan guru dengan rekan sesama guru menggunakan kuesioner maupun secara lisan. Berdasarkan penelitian tersebut maka penilaian terhadap kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk sesuai kebijakan masing-masing sekolah. Bentuk penilaian dilakukan dengan kuisisioner dan lisan yang dinilai oleh kepala sekolah dan rekan sesama guru yang biasanya dilakukan baik formal maupun informal.

Dari keempat kompetensi tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tidak menilai langsung guru-guru tetapi diserahkan ke pihak sekolah sehingga yang berkewajiban menilai kompetensi guru adalah kepala sekolah. Namun, dikhususkan untuk kompetensi pedagogik dan professional terdapat penilaian khusus dari pemerintah pusat melalui UKG. Penilaian kepala sekolah dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai pelaksana program-program peningkatan kompetensi guru dan juga sebagai penghubung dan penyedia data guru ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terutama ketika pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan program-program peningkatan kompetensi guru dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, dalam pelaksanaan UKG, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo bertugas untuk menginformasikan ke sekolah-sekolah terkait informasi pendaftaran hingga pelaksanaan UKG.

3.2. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Kulon Progo

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program untuk dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai upaya peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Kulon Progo. Program tersebut adalah Bimtek MGMP, Diklat Pendidikan Inklusi, dan Bimtek Karya Tulis. Program-program tersebut memiliki urgensi dan tujuan yang lebih spesifik sebagai upaya peningkatan kompetensi guru, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo memfokuskan pada 3 program yaitu sebagai berikut:

a) Bimtek MGMP

Upaya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran adalah melalui Bimtek MGMP (Bimbingan Teknis Musyawarah

Guru Mata Pelajaran). Program ini umumnya dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan guru dari setiap sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki komunitasnya masing-masing untuk memudahkan berjalannya program. Program ini sempat berhenti total ketika masa pandemi dan baru mulai lagi pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar serta memberi ruang diskusi mengenai masalah yang dihadapi guru mata pelajaran di dalam proses pembelajaran yang kemudian akan dirumuskan solusi dari masalah yang ada. Kegiatan belajar mengajar yang dimaksud dalam program ini mulai dari persiapan, pelaksanaan KBM, dan evaluasi dari hasil pembelajaran. Program ini mempunyai kegiatan yang beragam dan berbeda-beda setiap mata pelajaran karena setiap mata pelajaran mempunyai komunitas masing-masing sehingga acara yang terlaksana tergantung dengan komunitas mata pelajaran. Acara yang dilakukan umumnya berbentuk seminar, diklat, workshop, dan diskusi sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua guru bisa datang dan masing-masing sekolah diberi kuota 1-2 guru. Pada sekolah yang diteliti yaitu SMP N 1 Wates, SMP N 1 Sentolo, dan SMP N 2 Pengasih, ketiga sekolah tersebut memiliki cara tersendiri dalam pengiriman perwakilan guru untuk program MGMP. SMP N 1 Wates memilih guru dengan menanyakan ke guru mata pelajaran kemudian dari guru mata pelajaran tersebut mengusulkan nama untuk mewakili, SMP N 1 Sentolo mengirimkan perwakilan guru dengan mendahulukan guru-guru yang belum pernah ikut program tersebut, hampir sama dengan SMP N 2 Pengasih yang menjadwalkan guru yang harus mewakili program tersebut agar semua guru mendapatkan kesempatan yang sama.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ma'rifataini pada tahun 2014 bimtek MGMP dinilai kurang efektif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bimtek MGMP hanya efektif untuk meningkatkan kebutuhan guru dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan guru saja. Tujuan bimtek MGMP dalam mengembangkan profesi dan wawasan pendidikan masih belum maksimal. Program MGMP ini hanya tercapai pada kegiatan diskusi pendalaman materi, penyusunan dan pengembangan kurikulum, penyusunan program kerja pembelajaran, serta pengembangan instrumen dan evaluasi pembelajaran saja. Sedangkan kegiatan seminar, lokakarya, dan pelatihan lainnya belum berjalan maksimal. Manajemen organisasi yang kurang baik, pembinaan yang kurang, koordinasi yang kurang, serta keterbatasan dana dan sarana prasarana menjadi penyebabnya. Dari penelitian yang peneliti

lakukan di Kabupaten Kulon Progo program bimtek MGMP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dapat berjalan dengan lancar. Zulaeha, I., Sulisyaningrum, S., Suratno, S., Pristiwati, R., Arsanti, M., & Supriyono, A. Y. (2021), juga menunjukkan bahwa bimtek memberikan manfaat dalam meningkatkan pengelolaan pembelajaran. Kegiatan bimtek MGMP Kabupaten Kulon Progo berupa seminar, diklat, workshop, dan diskusi dapat terselenggara dengan lancar meskipun dana dari dinas terbatas. Selain itu, koordinasi yang dilakukan oleh koordinator komunitas dapat dilakukan dengan baik. Sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, peserta kegiatan juga merata karena pengiriman guru dari setiap sekolah dilakukan secara bergantian. Program bimtek MGMP di Kabupaten Kulon Progo dinilai efektif dalam menunjang kompetensi guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo.

b) Diklat Pendidikan Inklusi

Diklat pendidikan inklusi ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus serta menunaikan kewajiban pemerintah dalam PP nomor 13 tahun 2020 Pasal 5 tentang akomodasi yang layak oleh pemerintah dalam penyediaan dan penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah, K. Y. dkk. (2019) menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan kompetensi guru sekolah inklusif sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman guru sekolah inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus. Para guru dibekali keterampilan dasar terkait pendidikan inklusi yang ramah terhadap pembelajaran, mengetahui identifikasi setiap anak, dan dapat membantu anak mendapatkan layanan yang tepat. Selama proses pelatihan, para guru mampu menerima dan memahami materi yang diberikan dengan baik, hal ini tercermin dari keaktifannya dalam mengikuti seluruh kegiatan pelatihan, antusiasme dalam pemahaman materi yang diberikan, keaktifan dalam memberikan pertanyaan seputar masalah anak yang dihadapi, serta kesediaan mengikuti semua intruksi yang diberikan oleh narasumber.

Dari keterangan 3 sekolah yang diteliti, saat ini pemerintah sudah tidak memberikan guru pendamping khusus (GPK) untuk sekolah inklusi sehingga sekolah harus secara aktif dan mandiri untuk beradaptasi dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk GPK, sekarang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah tetapi setiap sekolah mengirimkan perwakilan guru untuk

menjadi GPK di sekolah tersebut dan akan diberikan pelatihan oleh pemerintah daerah dan pusat. Diklat pendidikan inklusi ini merupakan program baru dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Program ini terjadwal terlaksana pertama kali pada 10 Mei 2023 dan hanya diadakan 1 kali setiap tahunnya selama 6 hari. Walaupun program ini baru di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tetapi sebelumnya pelatihan sejenis sudah sering dilaksanakan dari DISDIKPORA Provinsi tetapi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo juga ikut berperan dalam menyebarkan informasi terkait hal tersebut. Perwakilan yang hadir di setiap pelatihan berkewajiban untuk meneruskan informasi ke sekolah masing-masing dengan cara dan sistem penyaluran informasi diserahkan ke pihak sekolah. SMP N 1 Wates dalam setiap pelatihan yang ditujukan untuk guru sudah menunjuk guru yang dikhususkan untuk mengikuti pelatihan dan hasil dari pelatihan tersebut baik oleh kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran yang mengikuti pelatihan akan dicatat lalu disebarluaskan ke seluruh guru dan akan disosialisasikan dalam waktu tertentu. Di SMP N 1 Sentolo ini melaksanakan pelatihan pendidikan inklusi sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo untuk perwakilannya tetapi untuk yang menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah menjadi tugas dari guru BK sehingga untuk pelatihan-pelatihan yang ada guru BK aktif mengikuti pelatihan pendidikan inklusi dan mensosialisasikan ke guru di SMP N 1 Sentolo bahkan ruang BK di sekolah tersebut diberi nama ruang BK dan Inklusi karena jika pembelajaran di dalam kelas tidak memungkinkan untuk ABK maka ABK tersebut akan dibantu dan didampingi di ruang tersebut. SMP N 2 Pengasih memberi keterangan bahwa semua guru yang ada sudah pernah ikut serta dalam pelatihan pendidikan inklusi tetapi pelatihan yang diikuti tersebut merupakan program dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY. Walaupun semua guru sudah berkesempatan mengikuti pelatihan tetapi SMP N 2 Pengasih juga seperti 2 sekolah sebelumnya yaitu tetap menyebarkan materi yang didapatkan saat pelatihan.

c) **Bimtek Karya Tulis**

Bimtek Karya Tulis ini ditujukan untuk guru yang >4 tahun mengajar tetapi belum naik pangkat sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kesejahteraan guru. Dikarenakan dalam pembuatan karya tulis ini tidak mudah sehingga guru-guru di Kabupaten Kulon Progo kurang berminat terutama guru

yang sudah hampir pensiun dalam membuat karya tulis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian rahman dkk. (2023) bahwa penyebab rendahnya kemampuan menulis adalah faktor usia, rata-rata guru yang memiliki pangkat yang tinggi sudah berusia lanjut sehingga semangat dan produktivitas menulisnya juga rendah. Tidak hanya itu faktor lainnya adalah guru sudah merasa puas dengan pendapatan dan kondisi ekonominya sekarang. Selain itu menurut para guru mengurus kenaikan pangkat adalah suatu hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang banyak tetapi belum tentu berhasil. Sehingga program ini berupaya untuk memotivasi guru agar naik pangkat sebagai bukti peningkatan kualitas dari individu.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo meminta kepada kepala sekolah mengirimkan 3 guru untuk mengikuti program tersebut. Untuk program tersebut berbentuk bimbingan. Untuk pelaksanaan bimbingan dilakukan sebanyak 3 gelombang yang mana di setiap gelombang sekolah harus mengirimkan 1 perwakilan. Dengan program ini diharapkan guru dapat memaksimalkan kesempatan untuk naik pangkat dengan membuat karya tulis. Untuk meningkatkan kompetensi guru Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program. Program yang pertama yaitu bimtek MGMP yang berbentuk seminar, diklat, workshop, dan diskusi. Selain itu juga terdapat diklat pendidikan inklusi dan bimtek karya tulis. Program-program tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nutrima Lestari pada tahun 2016 dengan judul “Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru pihak UPT menyelenggarakan diklat, workshop, dan pelatihan yang bertujuan untuk membekali guru-guru agar memiliki ilmu dan wawasan tentang pendidikan semakin luas. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Atut Sugiarti, Hartono, dan Nurhasanah pada tahun 2021 dengan judul “Upaya Strategik Penguatan Kompetensi Guru di SD Negeri 4 Krandegan Banjarnegara” menunjukkan upaya strategi penguatan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu: pertama, kompetensi pedagogik dikuatkan dengan berdiskusi dengan guru baik formal maupun non formal, memberi tugas kepada guru untuk melakukan penulisan hasil bimtek, mengadakan workshop IHT, supervisi, studi banding, menambah alokasi waktu. Kedua, kompetensi kepribadian dikuatkan dengan pemberian reward, kebebasan berpendapat, pembinaan, dan mendatangkan penceramah.

Ketiga, kompetensi profesional dikuatkan dengan memfasilitasi guru agar aktif di KKG, meningkatkan wawasan guru, mendorong guru untuk mengikuti lomba karya ilmiah/inovatif, memberikan tugas kepada guru untuk pembimbingan perlombaan akademik, menugaskan guru bimtek pengembangan kurikulum, melibatkan guru menjadi tim pengembang kurikulum di sekolah. Keempat, kompetensi sosial dikuatkan dengan perancangan pembelajaran dengan metode kooperatif, kegiatan berkelompok yang mengharuskan adanya kerjasama misalnya outbond, kegiatan ekstrakurikuler, wisata, menjadi teman sejawat dalam PTK, dan memberikan dispensasi kepada guru dalam kegiatan masyarakat.

3.3. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo

Ada banyak teori yang membahas mengenai proses implementasi, salah satunya yaitu teori Edward III (1980). Teori tersebut menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi syarat terpenting dalam keberhasilan suatu proses implementasi, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources) yang berkualitas, sikap pelaksana (dispositions or attitude) dalam pelaksanaannya, dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) yang disesuaikan dengan tupoksinya. Selain itu, pada tahap implementasi kebijakan, terdapat dua kategori faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan menurut teori Warwick (1979), yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat dari peningkatan kompetensi guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo:

a) Faktor Pendukung

Terdapat faktor pendukung dalam peningkatan kompetensi guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

i. Dukungan dari pemerintah

Pemerintah telah merumuskan berbagai program pendidikan dan kebijakan yang berkaitan dengan kompetensi guru. Hal tersebut tercantum dalam UU Sisdiknas, secara terperinci diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang

Kompetensi Guru yang merupakan salah satu bentuk kesempatan yang diberikan pemerintah kepada guru untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerjanya. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan berbagai kegiatan diklat atau seminar yang ditujukan kepada guru guna meningkatkan kompetensinya. Jika dikaitkan dengan Teori Edward III, dukungan dari pemerintah masuk ke dalam faktor struktur birokrasi dimana pemerintah telah melakukan kewajiban/tupoksinya untuk memberi fasilitas terkait peningkatan kompetensi guru.

ii. Dukungan komunitas MGMP

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan wadah perkumpulan para guru mata pelajaran di kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran maupun pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Dengan adanya dukungan dari komunitas MGMP berarti banyak guru menyadari dan memiliki motivasi untuk bergerak maju dalam peningkatan kompetensinya. Dukungan dari komunitas MGMP masuk ke dalam faktor sikap pelaksana jika dikaitkan dengan teori Edward III, dimana komunitas MGMP sangat menyambut positif adanya diklat MGMP.

iii. Kolaborasi dari berbagai pihak

Terdapat kolaborasi dalam bentuk kerjasama, interaksi, kompromi dari berbagai elemen baik individu maupun lembaga seperti dinas, sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, dan guru guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan teori Edward III, adanya kolaborasi dari berbagai pihak masuk ke dalam faktor komunikasi.

b) Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat dalam peningkatan kompetensi guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan kuota diklat yang diberikan oleh dinas

Dalam kegiatan diklat, sekolah hanya bisa mengirimkan 1-2 guru karena dari dinas hanya menyediakan kuota tersebut. Sekolah harus bisa memutar otak untuk membagi siapa guru yang akan diikuti dalam diklat tersebut. Padahal jika dilihat dari kebutuhan, semua guru memerlukan diklat tersebut guna menambah kompetensi yang dimiliki. Pada akhirnya sekolah akan menjadwalkan guru secara bergantian untuk mengikuti diklat tersebut. Berdasarkan teori Edward III, keterbatasan kuota diklat termasuk kedalam faktor sikap pelaksana karena pelaksana hanya menyediakan kuota yang terbatas kepada peserta diklat.

2. Kurangnya motivasi/minat guru untuk menulis karya ilmiah

Kurangnya motivasi/minat guru untuk menulis karya ilmiah disebabkan karena para guru mengalami kesulitan dalam penulisannya. Para guru tersebut belum terbiasa/belum memiliki pengalaman terkait penulisan karya ilmiah. Terlebih guru yang secara umur tergolong sudah tua, mereka lebih memilih untuk tidak naik pangkat dari pada harus menulis karya ilmiah. Jika dikaitkan dengan teori Edward III, rendahnya motivasi guru masuk ke dalam faktor sumber daya dimana guru-guru enggan untuk menulis karya ilmiah.

3. Tidak adanya pendampingan dan keberlanjutan program yang diberikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tidak sampai ke tahap pendampingan dan keberlanjutan saat pelaksanaan di sekolah sehingga program yang diadakan dianggap hanya untuk melaksanakan kewajiban. Dari banyaknya pelatihan dan seminar yang diikuti oleh berbagai pihak sekolah hanya berhenti di tahap pemberian teori dan sebatas latihan. Pemerintah daerah tidak mengambil sikap lebih lanjut untuk melihat proses pencapaian tujuan program sehingga hanya melihat pada hasilnya saja.

Berdasarkan teori Edward III, kurangnya pemberian praktik langsung masuk ke dalam faktor sumber daya dimana sumber daya

dari pelaksana hanya memberikan teori dan minim memberi praktik langsung.

Dari hasil penelitian, jika dilihat dari teori model implementasi dari Pressman dan Wildavsky yang berfokus pada cara kebijakan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut dapat memberikan pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Makna implementasi menurut Pressman dan Wildavsky adalah menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji sesuai dokumen kebijakan (to fulfill), menghasilkan luaran sesuai tujuan kebijakan (to produce), serta mewujudkan tujuan kebijakan (to complete). Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo kurang sesuai dengan teori Pressman dan Wildavsky. Dinas Kabupaten Kulon Progo menjalankan kebijakan berdasarkan arahan dari pusat sesuai dengan dokumen kebijakan. Akan tetapi sasaran kurang melaksanakan program sesuai dengan arahan, beberapa guru yang sesuai dengan kriteria untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guru dari dinas tidak mau mengikuti program tersebut. Seperti guru yang sudah 4 tahun tidak naik jabatan dan guru yang hampir pensiun yang tidak mau mengikuti program karya tulis karena merasa kesulitan dalam hal akademik dan merasa sudah cukup akan pencapaiannya. Tujuan kebijakan pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru kurang tercapai. Sasaran program yang kurang berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan mengakibatkan output yang dihasilkan kurang baik. Kurangnya pendampingan dari dinas juga menyebabkan tujuan program peningkatan kompetensi guru kurang tercapai.

Jika dilihat dari teori top-down implementasi program peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo juga kurang sesuai. Berdasarkan teori top-down keputusan kebijakan dibentuk oleh pemerintah pusat kemudian implementasi kebijakan dilaksanakan secara tersentralisir oleh birokrat pada level bawahnya. Teori top-down ini juga melihat sejauh mana tindakan para pelaksana yang sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sudah melaksanakan program peningkatan kompetensi guru sesuai dengan keputusan kebijakan dari

pemerintah pusat. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan tidak dipaksakan kepada sasaran karena Dinas hanya berperan sebagai perantara program yang akan dilaksanakan oleh sasaran. Dinas tidak memaksa guru atau memberikan teguran kepada guru yang tidak mau mengikuti program meskipun guru tersebut memenuhi kriteria peserta program. Dinas tidak terlalu memperhatikan keberhasilan program sepenuhnya, tetapi hanya sekedar menjalankan program saja. Seperti guru yang tidak mengikuti program karya tulis padahal memenuhi kriteria peserta progra hanya dibiarkan begitu saja tidak diberikan surat perintah atau teguran lain. Tindakan dari dinas masih kurang tegas terhadap ketercapaian tujuan serta kepatuhan sasaran.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Seorang guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dalam uji kompetensi guru hanya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang diujikan, sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai oleh pihak-pihak yang berinteraksi dengan guru. Berdasarkan hasil UKG tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir terlaksananya uji kompetensi guru, Kabupaten Kulon Progo mendapatkan hasil UKG pada jenjang sekolah menengah pertama sebesar 68,03. Dari hasil tersebut, Kulon Progo mendapat nilai terendah pada jenjang sekolah menengah pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Dalam meningkatkan kompetensi guru sekolah menengah pertama di Kulon Progo Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program yaitu 1) bimtek MGMP yang berbentuk seminar, diklat, workshop, dan diskusi sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua guru bisa datang dan masing-masing sekolah diberi kuota 1-2 guru, 2) diklat pendidikan inklusi yang merupakan program baru dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun, 3) bimtek karya tulis ditujukan untuk guru yang mengajar lebih dari 4 tahun tapi belum naik pangkat sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kesejahteraan guru.

Dalam melaksanakan program-program tersebut tentu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari program peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Kulon Progo, yaitu adanya dukungan dari pemerintah, dukungan dari komunitas MGMP, dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu keterbatasan kuota diklat yang diberikan oleh dinas, kurangnya motivasi/minat

guru untuk menulis karya ilmiah, dan dalam diklat inklusi hanya diberikan teori saja tanpa ada praktik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo perlu membuat kebijakan atau program baru yang merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi guru dan sekolah sehingga program yang sudah dilaksanakan akan berpengaruh besar pada peningkatan kompetensi guru. Selain itu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melakukan evaluasi, monitoring, dan mengawasi keberlanjutan program yang sedang dilaksanakan sehingga dinas dapat menerima feedback dari sasaran.

5. Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, kami dapat menyelesaikan penelitian mahasiswa dengan judul “ Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di Kabupaten Kulonprogo”. Dengan selesainya hasil laporan penelitian ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memperluas pemahaman dan memberikan informasi yang berguna dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan. Kami menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya hasil laporan akhir penelitian ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat kami berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu kami dalam penelitian. Secara khusus, kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ebni Sholikhah, S.Pd.,M.Sc. selaku dosen pendamping yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, dan memberikan perhatian selama proses penelitian ini. Terimakasih juga kepada Ibu Dra. Tatik Susilowati selaku Kepala Seksi PTK SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo, Bapak Sugiyanto selaku Operator PTK SMP Kabupaten Kulonprogo, Bapak Guryadi, S.Pd selaku wakil kepala sekolah SMP N 1 Wates, Bapak Margiyanto, S.Pd selaku kepala sekolah SMP N 2 Pengasih dan Bapak Kuswoyo, S.Pd. selaku guru bimbingan konseling SMP N 1 Sentolo atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian disana. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan hasil penelitian ini, kami sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan hasil akhir penelitian ini. Cukup banyak kesulitan yang kami alami dalam penyusunan laporan hasil akhir penelitian ini, tetapi alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata, kami berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Bab, I. V. (2018). Kebijakan pendidikan. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN, 133.
- Bachtiar, W. 1997. Metode Penelitian Ilmu Dakwah. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Badan Pusat Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020).
- Desliana, Maulipaksi. 7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015. Kemdikbud, 04 Januari 2016.
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19.
DOI:<https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02>
- Edward III GC. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, H. (2020). Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya
- Holiah, I. (2022). Penguatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. *Eduvis*, 7(1), 84-96.
- Iskandar, Jusman. (2016). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga
- Jamin, H. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19-36.
- Kemenag. (2015). Modul: Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). diktis.kemenag.go.id
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023).
- Khairiyah, K. Y., dkk. (2019). Pelatihan Kompetensi Guru Sekolah Inklusif dalam Pemahaman Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Karimun. *Jurnal Pendidikan MINDA*: 1(1).
- Kodrat, D. (2019). Urgensi Perubahan Pola Pikir dalam Membangun Pendidikan Bermutu. *Islamic Research*, 2(1), 1–6.
<http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/23>

- Kodrat, D. (2019). Urgensi Perubahan Pola Pikir dalam Membangun Pendidikan Bermutu. *Islamic Research*, 2(1), 1–6.
<http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/23>
- Lestari, N. (2016). Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5(7), 753-762.
- Lailatussaadah, L. (2015). Upaya peningkatan kinerja guru. *Intelektualita*, 3(1).
- Ma'rifataini, L. (2014). Efektivitas MGMP dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Umum di MTS. *Jurnal edukasi* 12(1) 70-81.
- Nurainina, D. R. (2018). Pendekatan *Commond Control* dalam Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi tentang Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 Pada Kalangan Pelajar di Kota Surabaya. Universitas Airlangga.
- Nur, F., & Kurniawati, A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1).
- Permendikbud No 35 Tahun 2010 tentang Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Purba, S., Revida, E., Tamrin, A. F., Bachtiar, E., Purba, B., Ramadhani, Y. R., ... & Hidayatulloh, A. N. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan. Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto & Sulistyastuti, D. R. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif.
- Rohman (2014). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rohman, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal MADINASIKA manajemen dan keguruan* 2(1), 92-102
- Rostaviana, R. P. (2018). Uji Kompetensi Guru Dan Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 84–95. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/>
- Rostaviana, R. P. (2018). Uji Kompetensi Guru dan Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 84–95. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/>
- Setiawan, G.(2015). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiarti, A., Hartono, H., & Nurhasanah, N. (2021). Upaya Strategik Penguatan Kompetensi Guru di SD Negeri 4 Krandegan Banjarnegara. *Jurnal Kependidikan*, 9(2), 287-305.
<https://doi.org/10.24090/jk.v9i2.5223>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>

Warwick, D. P. (1979). *A Theory of Public Bureaucracy*, Massachussets.

Zainuddin, A., Harahap, P., & Naldi, W. (2023). Motivasi Guru Menulis Karya Ilmiah; Faktor Penyebab dan Solusi (Studi Kasus Pada Guru Pai Di Sekolah Menengah Atas Negeri Rejang Lebong-Bengkulu). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01).

Zulaeha, I., Sulisyaningrum, S., Suratno, S., Pristiwati, R., Arsanti, M., & Supriyono, A. Y. (2021). Bimtek Pengembangan Bahan Ajar Digital Bahasa Indonesia Bermuatan Multikultural bagi Guru MTs/SMP di Kota Semarang. *Journal of Community Empowerment*, 1(2), 01-06.